

# Prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak

Gedung IPTEKS Universitas Hasanuddin  
10 November 2015



**Program Studi Ilmu Politik**  
Universitas Hasanuddin  
Makassar, indonesia  
2015

**Prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak**

**Editor**

Gustiana A. Kambo

Ahmad Zulfikar

**Cover & Layout**

Zulfikar

**Dicetak**

Penerbit De La Macca Makassar

**ISBN 978 602 73502 05**

**Program Studi (S1 & S2)**

**Ilmu Politik Universitas Hasanuddin**

x + 1-261 hal, 210 x 297 mm

## KATA PENGANTAR

Selamat datang dan terima kasih atas partisipasinya dalam **Seminar Nasional Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015** yang dilaksanakan di Universitas Hasanuddin, Kampus Tamalanrea, 10 November 2015. Seminar ini diselenggarakan atas kerjasama Program Studi (S1 & S2) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia dan Pengurus Cabang Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PC AIPI) Kota Makassar.

Tujuan diselenggarakannya Seminar ini untuk mengetahui sejauh mana kesiapan daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015 dengan melibatkan kalangan akademisi dan praktisi. Melalui penyelenggaraan Seminar ini kami diharapkan akan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia.

Dalam buku program ini tersaji 31 Abstrak yang diterima oleh panitia dalam 2 gelombang penerimaan dan telah diseleksi dengan teliti, hingga karya-karya terbaik ini hadir dihadapan Bapak/Ibu/Saudara. Buku program ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak yang menyajikan makalah lengkap dari Abstrak yang telah tampil dalam buku ini yang kami dikategorikan ke dalam 4 sub-tema, antara lain: (1) Demokrasi dan Partisipasi Publik, (2) Regulasi Pilkada, (3) Institusionalisasi Partai Politik dan (4) Politik Dinasti.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah terlibat untuk mendukung kesuksesan acara ini, diantaranya: Ketua DKPP RI, Ketua KPU RI, Ketua BAWASLU RI, Gubernur Sulawesi Selatan, Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS dan rekan-rekan panitia di Program Studi (S1 & S2) Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Semoga kerjasama yang baik ini dapat membawa manfaat untuk Indonesia yang lebih baik di masa kini dan masa yang akan datang.

Makassar, 10 November 2015

**Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.**  
Ketua Panitia Pelaksana

## SAMBUTAN DEKAN

*Assalamualaikum wr. wb.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan perkenannya kita dapat hadir dalam acara seminar ini. Menyambut Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 yang akan datang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Komisi Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu RI mengadakan Seminar Nasional Menyongsong Pilkada Serentak 2015.

Sebagai salah satu fakultas yang memiliki visi mengembangkan ilmu sosial dan ilmu politik melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, maka seminar ini kami laksanakan bersama sebagai bentuk pengabdian masyarakat berbasis pengembangan ilmu, sesuai dengan kondisi obyektif dan kebutuhan masyarakat.

Pilkada Serentak 2015 gelombang pertama yang akan dilaksanakan di 269 daerah pilkada ini merupakan langkah awal menuju desain ideal pilkada serentak. Setelah ini, Pilkada Serentak gelombang kedua akan dilaksanakan pada Februari 2017 dan gelombang ketiga pada Juni 2018 hingga menuju Pilkada Serentak Nasional pada tahun 2027.

Kami bangga bahwa FISIP Universitas Hasanuddin dapat terus berkontribusi untuk merespon isu-isu di tingkat nasional dan global yang menjadi perhatian dari masyarakat serta menjadi corong pengembangan ilmu. Dari seminar ini, kami turut mengambil bagian dalam ketentuan konstitusi untuk melaksanakan Pilkada Serentak yang adalah bagian dari keinginan bangsa untuk terus maju.

Melalui seminar ini, kami berharap dapat menghasilkan luaran yang berguna bagi pelaksanaan Pilkada Serentak nantinya agar dapat menjadi pilkada yang berlangsung aman, tertib dan luber jurdil.

Selamat membaca dan Salam Hangat

*Wassalamu alaikum wr. wb.*

Makassar, 10 November 2015  
Dekan FISIP UNHAS

**Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si.**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Sambutan Dekan	iv
Daftar Isi	v
Agenda Seminar	viii
<b>TEMA 1. DEMOKRASI DAN PARTISIPASI PUBLIK</b>	
<b>Pilkada, Demokrasi dan Partisipasi Politik</b>	
Muhammad Kausar Bailusy	1
<b>Dampak Politik Sebelum Pemilukada Di Kabupaten Jenepono</b>	
Armin	7
<b>Menemu Kenali Problem Pemilukada Serentak dan Kanalisasinya</b>	
Muhadam Labolo	23
<b>Media Massa, Pilkada Dan Demokrasi</b>	
Andi Alimuddin Unde	31
<b>Memahami Sistem Pilkada dalam Perspektif Demokrasi</b>	
Gustiana A Kambo	37
<b>Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada</b>	
Adi Suryadi Culla	43
<b>Implikasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak terhadap Aspek Sosial, Politik, dan Ekonomi</b>	
Achmad Zulfikar dan Baharuddin Nur	49
<b>Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi Lokal</b>	
Bisariyadi	55
<b>Hipokrisi Demokrasi: Populisme dan Pilkada di Indonesia</b>	
Haryanto dan Rizkika Lhena Darwin	63
<b>Mendulang Partisipasi Publik dalam Pengembangan Demokrasi dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak</b>	
Siti Malikhatun Badriyah	71
<b>Aksesibilitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak bagi Warga Negara Disabilitas</b>	
Fajri Nursyamsi dan Estu Dyah Arifianti	79
<b>Partisipasi Politik Etnis Jawa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tebo</b>	
Andri Putra Kesmawan dan Mulia Jaya	89
<b>Ragam Bahasa Indonesia dalam Kampanye Politik: Refleksi Menuju Pilkada Serentak</b>	
Sitti Rabiah dan Nurfathana Mazhud	97
<b>Blusukan sebagai <i>New Culture</i> Komunikasi Politik pada Pilkada Serentak 2015 di Indonesia</b>	
Nur Khaerah dan Andri Putra Kesmawan	101

<b>Motivasi Mantan Keuchik Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Bireuen</b> Effendi Hasan dan Faroq Al Anbari	107
<b>Netralitas Gereja Protestan Maluku dalam Pemilukada</b> Rahman Hasim dan Hendry Bakri	113
 <b>TEMA 2. REGULASI PILKADA</b>	
<b>Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 dalam Perspektif <i>Electoral Justice System</i></b> Bambang Eka Cahya Widodo	121
<b>Sistem Pemilihan dan Rekrutmen Politik: Suatu Tinjauan Konseptual-Teoretik dan Renungan Menjelang Pilkada Serentak</b> Jayadi Nas	131
<b>Menyoal Regulasi Pilkada: Upaya Penguatan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu</b> Dian Aulia	139
<b>Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015</b> Firman Manan	147
<b>Proyeksi Konstitusional Badan Peradilan Khusus Pilkada</b> Fajar L. Soeroso	155
<b>Independensi Lembaga Survei dalam Penyelenggaraan Survei dan Hitung Cepat Pilkada melalui Telaah Putusan MK No. 9/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 24/PUU-XII/2014</b> Nuzul Qur'aini Mardiyah	163
<b>Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya bagi Pemerintah Daerah di Indonesia</b> Ratnia Solihah dan Siti Witianti	171
<b>Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada Serentak 2015</b> Anggriani Alamsyah, Andi Aslinda dan Sosiawaty	179
 <b>TEMA 3. INSTITUSIONALISASI PARTAI POLITIK</b>	
<b>Pilkada Serentak, Eksklusi Partai Politik, dan Masa Depan Politik Representasi</b> Caroline Paskarina	187
<b>Institusionalisasi Partai Politik: Studi Kasus Hegemoni PAN di Sulawesi Tenggara</b> Eka Suaib	197
<b>Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015: Kasus Usungan Non-Kader DPD PAN Kabupaten Majene</b> Muhammad	207
<b>Institusionalisasi Partai Politik</b> Rusdianto Sudirman	215

<b>Dampak Party Switching terhadap Partai Politik dan Sistem Kepartaian</b> Andi Ali Armunanto	221
<b>TEMA 4. POLITIK DINASTI</b>	
<b>Politik Dinasti dalam Kajian Konstitusi Pasca Putusan MK</b> Lita Tyesta Addy Listya Wardhani	229
<b>Politik Dinasti: Membangun Politik Hukum Pilkada yang Demokratis Pasca Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015</b> Anna Triningsih	235
<b>Reproduksi Status Tradisional dalam Praktik Politik di Kabupaten Wajo</b> Munauwarah dan A. M. Yusuf	245
<b>Pilkada, Patronase dan 'Pengawetan' Kekuasaan</b> Syarifuddin Jurdi	255